

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

Yoga Tantular Rachman⁽¹⁾ Yogo Heru Prayitno⁽²⁾ Remon Gunanta⁽³⁾

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

yoga.tantular@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan akuntansi pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai salah satu sarana mempersiapkan diri dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah mulai diterapkan. Faktor akuntansi merupakan fokus sementara penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode deskriptif. Data dari hasil observasi langsung melalui kuesioner dan wawancara diolah dan dideskriptifkan dengan berdasarkan sumber dari literatur (artikel, buku, majalah, dll).

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden sangat setuju bahwa Aspek Akuntansi Manajemen, Aspek Akuntansi Keuangan, Aspek Pengendalian Internal serta Aspek Perpajakan dapat menjadi faktor pendorong IKM mempersiapkan diri menghadapi MEA.

Keyword: IKM, MEA, komponen bisnis dan dunia usaha.

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the application of accounting on Small and Medium Industries (IKM) as one means of preparing themselves in the face of the ASEAN Economic Community (MEA) that have begun to be applied. Accounting factors are a temporary focus of this research. The research method used by researchers is descriptive method. Data from the results of direct observation through questionnaires and interviews are processed and described based on the source of the literature (articles, books, magazines, etc.).

Based on the results of the study, most respondents strongly agree that the Aspects of Management Accounting, Financial Accounting Aspects, Internal Control Aspects and Tax Aspect can be a factor driving SMIs to prepare themselves against MEA.

Keyword: IKM, MEA, business component and business world.

I. PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya kompetisi dan globalisasi, setiap pelaku usaha dituntut untuk lebih kreatif. Memasuki era pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), sumber daya manusia lokal tidak hanya akan bersaing di tingkat nasional saja, melainkan bersaing di tingkat internasional, yaitu negara-negara tingkat ASEAN semisal Philipina, Malaysia, Thailand, dll. Hal ini tentunya harus disikapi secara positif, karena dengan persaingan semakin berat diharapkan memacu SDM lokal untuk lebih memaksimalkan potensinya, terutama Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). IKM dan UKM sebenarnya diharapkan dapat menjadi pilar-pilar kokoh penggerak dalam meningkatkan perekonomian.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah mengatakan daya saing sektor industri kecil dan menengah (IKM) terus digenjot untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Dua langkah yang menjadi perhatian adalah gugus kendali mutu (GKM) dan penerapan standar nasional Indonesia (SNI). Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM). Kedua program tersebut diharapkan dapat membantu pembinaan standar IKM di Tanah Air ([http:// Kemenperin](http://Kemenperin), 2015). Kemenperin juga menyebutkan, tercatat pada 2013 jumlah IKM di Indonesia mencapai 3,9 juta unit dan mampu menyerap tenaga kerja 10,3 juta orang. Jumlah tersebut menyumbang ekspor sebesar USD19,58 juta. Sementara nilai produksi IKM mencapai Rp753 triliun atau memiliki kontribusi sebanyak 10% dalam pembentukan PDB sektor industri terhadap PDB nasional.

Sayangnya, jika melihat daya saing Indonesia yang diukur dengan indeks daya saing kinerja industri (*Competitiveness Industrial Performance*), daya saing Indonesia masih berada dibawah beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, Malaysia, dan Filipina (Ardiansyah, 2014). Akibatnya, di pasar Indonesia, produk-produk IKM Indonesia dimungkinkan dapat kalah bersaing dengan produk-produk negara ASEAN lainnya. Dengan kata lain, dimungkinkan Indonesia menjadi pasar utama bagi negara-negara ASEAN lainnya. Agar hal tersebut tidak terjadi, diperlukan suatu upaya khusus agar para pelaku usaha IKM Indonesia mampu bersaing dengan ASEAN lainnya di pasar Indonesia dan di pasar negara ASEAN lainnya (Bakti, 2015).

Untuk dapat bersaing, IKM wajib membenahi internal manajemennya, dengan lebih memperhatikan kembali budaya perusahaan, sistem produksi, pelaporan keuangan, akuntansi manajemen, pemasaran, pengendalian serta perpajakan. Komponen-komponen internal tersebut yang akan menjadi pondasi kuat bagi IKM dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu akuntansi dan kewirausahaan (bisnis), karena banyak melibatkan aspek informasi keuangan dan sistem bisnis pada IKM dan UKM. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian terkait dengan solusi bersaing IKM dan UKM dalam menghadapi persaingan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Konferensi Tingkat Tinggi *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) ke-9 yang diselenggarakan di Provinsi Bali tahun 2003, antar seluruh kepala negara anggota ASEAN telah menyepakati pembentukan komunitas ASEAN dengan dideklarasikannya Bali *concord II*. Perdagangan barang, jasa, modal dan investasi akan bergerak bebas tanpa halangan secara

geografis akan terjadi dengan adanya komunitas yang dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) ini,

Dani Aulia (2014) mengemukakan ASEAN akan ber "integrasi" menjadi sebuah organisasi kawasan yang lebih solid dan maju, membangun kebersamaan untuk satu tujuan (satu visi, satu identitas, satu komunitas), mendorong terciptanya kekompakan, kesamaan visi satu tujuan, kesejahteraan bersama, dan saling peduli diantara Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara.

2.1 Strategi Umum dalam Menghadapi MEA

Bagus Prasetyo (2014) mengungkapkan ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian atau catatan bagi dunia ketenagakerjaan sebelum saatnya negara kita benar-benar akan memasuki MEA. **Pertama**, dari sisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Meskipun sumber hukum ketenagakerjaan di Indonesia terdapat ketentuan hukum yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan peraturan pokok yang berisi pengaturan secara menyeluruh dan komprehensif di bidang ketenagakerjaan. Hal inilah yang menjadi pegangan sebagai aturan main dunia ketenagakerjaan di Indonesia saat memasuki MEA.

Kedua, dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) pekerja Indonesia. Kompetisi SDM antar negara ASEAN merupakan hal yang pasti terjadi saat terbukanya gerbang MEA nanti. Bila pekerja Indonesia tidak siap menghadapi persaingan terbuka ini, MEA akan menjadi momok bagi pekerja Indonesia karena akan kalah bersaing dengan pekerja dari negara ASEAN lainnya.

Ketiga, dari penegak hukum khususnya pengawas ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 134 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa "Dalam mewujudkan pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja/buruh dan pengusaha, pemerintah wajib melaksanakan pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan". Posisi pengawas ketenagakerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam hubungan industrial untuk menghadapi MEA agar semakin kondusif dan sebagai pelindung bagi pekerja dalam menghadapi persaingan global ini. Upaya persiapan yang harus segera dibenahi adalah kualitas dan kuantitas tenaga pengawas ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan terhadap penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa dalam menghadapi MEA, SDM Indonesia dituntut untuk memaksimalkan seluruh potensinya, baik potensi internal maupun eksternalnya agar mampu bersaing dengan SDM dari Negara ASEAN. Berdasarkan hal tersebut pula kekhawatiran akan meningkatnya pengangguran di Indonesia dan tidak dapat bersaingnya produk IKM lokal dapat di minimalisir.

2.2 Membentuk IKM dan UKM yang Kokoh

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN *Economic Community* akan berlaku pada 2015. Pergerakan barang, modal, jasa, investasi, dan orang yang telah disepakati akan bebas ke luar masuk di antara Negara anggota ASEAN. Faktor utama yang harus dibenahi oleh IKM dan UKM adalah internal manajemen perusahaan yang merupakan pondasi dari sebuah usaha. Menurut Yushita (2011), persoalan yang dihadapi UMKM meliputi akses permodalan, pemasaran, manajemen usaha dan keuangan, aspek legal dan pemasaran. Oleh peneliti dikembangkan menjadi:

Aspek Akuntansi Manajemen

Lingkungan yang lebih kompetitif organisasi bisnis sudah seharusnya merubah paradigma bisnis ke arah modern. Akuntansi manajemen sangat berperan dalam lingkungan bisnis yang lebih kompetitif bagi organisasi bisnis dalam paradigma bisnis modern. Berikut merupakan beberapa manfaat akuntansi manajemen yang dikemukakan oleh Martius (2012): 1) Akuntansi manajemen membantu memelihara dan mengendalikan sumber daya perusahaan; 2) *Tracking Performance*; 3) *Planning*, serta 4) *Managing cost and price*. Manfaat di atas akan terasa oleh suatu organisasi bisnis manakala penerapan akuntansi manajemen diterapkan dengan semestinya oleh orang-orang yang memiliki kompetensi.

Aspek Akuntansi Keuangan

Penerapan akuntansi keuangan dalam organisasi bisnis menjadi suatu hal yang wajib untuk perkembangan serta kelangsungan usaha. Standar akuntansi keuangan yang dapat digunakan oleh IKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) yang memang diperuntukkan bagi usaha atau industri kecil dan menengah.

Manfaat dan keputusan usaha yang dijalankan berdasarkan akuntansi sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Ediraras (2010) antara lain: a) Penilaian kinerja usaha dan sebagai bahan evaluasi untuk masa yang akan datang; b) berguna sebagai dasar pertimbangan pembelian bahan baku untuk produksi dan alat-alat produksi; c) keputusan mengenai harga, misalnya penentuan harga jual, banting harga, kenaikan harga barang/jasa, dan lain-lain; d) mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank; e) untuk pengembangan usaha, keputusan

untuk membuka atau menutup cabang; f) penambahan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan penghasilan karyawan, pemberian bonus kepada karyawan; g) penyusunan anggaran untuk periode berikutnya; h) penambahan asset usaha; i) promosi usaha.

Aspek Pengendalian

Fungsi pengendalian (*controlling*) merupakan fungsi terakhir proses manajemen dimana fungsi ini berperan penting dan menjadi penentu pelaksanaan proses manajemen. Fungsi pengendalian berusaha untuk mengevaluasi apakah tujuan organisasi dapat tercapai dan apabila tidak dapat tercapai maka dicari faktor penyebabnya yang selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa pengendalian merupakan suatu proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (Tiasari, 2013).

Aspek Perpajakan

Pajak merupakan iuran wajib berdasar undang-undang yang disetor ke kas Negara oleh rakyat. Setiap penghasilan yang sudah melewati batas tidak dikenakan pajak sesuai peraturan yang berlaku harus dikenakan pajak. Industri Kecil dan Menengah termasuk subjek pajak yang atas penghasilannya harus dipotong pajak. Membayar pajak adalah untuk kita juga. Namun, ada rasa aneh ketika penerima manfaat atas uang pajak, penikmat fasilitas publik, bukanlah seorang pembayar pajak atau Wajib Pajak. Padahal mereka ini bukanlah orang miskin. Apakah kita, sebagai pembayar pajak, rela ikut menanggung dan memberikan fasilitas publik kepada mereka?

Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Amanita, 2011).

III. METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif adalah metode yang

digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi dan suatu sistem pemikiran serta peristiwa yang akan terjadi (Sugiyono, 2010).

Tujuan dari suatu penelitian deskriptif adalah untuk membuat eksploratif gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara berbagai gejala yang akan diteliti.

Jumlah populasi sasaran pada penelitian ini adalah pelaku usaha kecil dan menengah serta calon pelaku usaha kecil dan menengah binaan Business Community Development (BCD) Universitas Widyatama. Sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha kecil dan menengah serta calon pelaku usaha kecil dan menengah binaan Business Community Development (BCD) Universitas Widyatama yang mengikuti workshop kerjasama antara peneliti dan BCD Widyatama.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil diskusi, wawancara dan juga hasil dari kuesioner yang diisi oleh para pelaku usaha kecil dan menengah serta calon pelaku usaha kecil dan menengah kami mendapatkan hasil sebagai berikut.

5.2.1 Penilaian terhadap Aspek Akuntansi Manajemen

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait kebutuhan informasi yang berhubungan dengan peristiwa masa yang akan datang menunjukkan sejumlah 33.0% responden sangat setuju atas kebutuhan informasi yang berhubungan dengan peristiwa masa yang akan datang, 64.0 % responden setuju atas kebutuhan informasi yang berhubungan dengan peristiwa yang akan datang, yang menyatakan netral sebesar 3.0% atas kebutuhan informasi yang berhubungan dengan peristiwa yang akan datang.

Hasil jawaban responden diatas menunjukkan bahwa responden membutuhkan informasi yang berhubungan dengan peristiwa di masa mendatang. Informasi tersebut penting untuk menentukan strategi yang dilakukan untuk menjalankan kegiatan usahanya.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait kebutuhan informasi non keuangan menunjukkan sejumlah 64.0% responden sangat setuju atas kebutuhan informasi non keuangan, 36.0% responden setuju atas kebutuhan informasi non keuangan, yang menyatakan netral sebesar 3.0% atas kebutuhan informasi non keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa responden juga sangat peduli dengan berbagai informasi non-keuangan. Informasi non-keuangan menurut Warren & Reeve (1997) meliputi perputaran persediaan, ketepatan pengiriman, jeda waktu antara order konsumen dengan produktivitas

pengiriman, ranking yang dibuat konsumen dibandingkan dengan Kompetitor, waktu respon kegiatan after sales, waktu untuk mengembangkan produk, kepuasan konsumen, dan jumlah konsumen yang melakukan complain.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian menunjukkan sejumlah 47.0% responden sangat setuju atas kebutuhan informasi non ekonomis, 42.0% responden setuju atas kebutuhan informasi non ekonomis, yang menyatakan netral sebesar 11.0% atas kebutuhan informasi non ekonomis. Responden menganggap kebutuhan informasi non-ekonomis juga menjadi faktor penting untuk dapat menghadapi MEA. Informasi non-ekonomis antara lain social, budaya, sumberdaya manusia, dan faktor politik dan administrative.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian menunjukkan sejumlah 69.0% responden sangat setuju atas kebutuhan informasi tentang faktor-faktor eksternal, 31.0% responden setuju atas kebutuhan informasi tentang faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal dalam penelitian ini berkaitan dengan peluang dan ancaman dari pihak luar. Adanya pesaing, pendatang baru, lingkungan, pemasok, pembeli, dan produk pengganti menjadi faktor-faktor yang sangat diperhatikan oleh responden.

5.2.2 Penilaian terhadap Aspek Akuntansi Keuangan

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait **Akuntansi sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengawasan serta pengendalian** menunjukkan sejumlah 44.0% responden sangat setuju atas **Akuntansi sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengawasan serta pengendalian**, 25.0% responden setuju atas **Akuntansi sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengawasan serta pengendalian**, yang menyatakan netral sebesar 31.0% atas **Akuntansi sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengawasan serta pengendalian**.

Hasil jawaban responden masih terdapat 31% jawaban responden yang menyatakan netral, atau dengan kata lain akuntansi sebagai alat perencanaan, koordinasi, pengawasan serta pengendalian dianggap tidak begitu penting. Fokus utama responden saat diwawancara adalah untuk mengembangkan usahanya dan dapat bersaing, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan akuntansi tidak menjadi perhatian utamanya. Akuntansi akan menjadi terasa penting saat usahanya menjadi besar dan banyak orang didalamnya yang sudah tidak dapat dimonitor satu per satu.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait **Akuntansi sebagai dasar untuk menghitung besar pajak** menunjukkan sejumlah 8.0% responden sangat setuju

atas **Akuntansi sebagai dasar untuk menghitung besar pajak**, 56.0% responden setuju atas **Akuntansi sebagai dasar untuk menghitung besar pajak** yang menyatakan netral sebesar 31.0% atas **Akuntansi sebagai dasar untuk menghitung besar pajak**, yang menyatakan tidak setuju sebesar 6.0% atas **Akuntansi sebagai dasar untuk menghitung besar pajak**. Responden yang paling banyak (56%) menyatakan setuju jika akuntansi sebagai dasar untuk menghitung pajak. Hal ini berarti responden menganggap penting terkait adanya bagian akuntansi dalam kegiatan usahanya.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait **Akuntansi sebagai informasi keuangan bagi investor** menunjukkan sejumlah 6.0% responden sangat setuju atas **Akuntansi sebagai informasi keuangan bagi investor**, 67.0% responden setuju atas **Akuntansi sebagai informasi keuangan bagi investor** yang menyatakan netral sebesar 22.0% atas **Akuntansi sebagai informasi keuangan bagi investor**, yang menyatakan tidak setuju sebesar 6.0% atas **Akuntansi sebagai informasi keuangan bagi investor**. Berdasarkan hasil yang didapat, diketahui bahwa mereka setuju bahwa akuntansi adalah bagian yang penting dalam mendapatkan investor. Investor sebelum menginvestasikan uangnya ke usaha harus mengetahui kinerja perusahaan yang salah satunya bisa dilihat dari akuntansi.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait **Akuntansi merupakan alat pertanggungjawaban** menunjukkan sejumlah 22.0% responden sangat setuju atas **Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban**, 64.0% responden setuju atas **Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban**, yang menyatakan netral sebesar 11.0% atas **Akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban**. Berdasarkan beberapa jawaban di atas, responden sudah menyadari akan pentingnya akuntansi sebagai alat pertanggungjawaban. Akuntansi dapat dijadikan alat pertanggungjawaban karena melalui informasi yang diberikan oleh akuntansi akan kelihatan kinerja usaha yang dilakukan.

5.2.3 Penilaian terhadap Aspek Pengendalian

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Lingkungan pengendalian yang memadai menunjukkan sejumlah 6,0 % responden sangat setuju atas Lingkungan pengendalian yang memadai 31.0% responden setuju atas Lingkungan pengendalian yang memadai yang menyatakan netral sebesar 58.0% atas Lingkungan pengendalian yang memadai, yang menyatakan tidak setuju sebesar 3% atas Lingkungan pengendalian yang memadai serta sangat tidak setuju atas Lingkungan pengendalian yang memadai 3%.

Secara umum responden menganggap lingkungan pengendalian masih dianggap belum begitu penting dalam kegiatan usaha. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap lingkungan pengendalian dan kegiatan usaha yang dilakukan masih bersekala kecil.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Memperhatikan penilaian risiko yang harus ditanggung menunjukkan sejumlah 6,0 % responden sangat setuju atas Memperhatikan penilaian risiko yang harus ditanggung 28.0% responden setuju atas Memperhatikan penilaian risiko yang harus ditanggung yang menyatakan netral sebesar 64.0 % atas Memperhatikan penilaian risiko yang harus ditanggung, yang menyatakan tidak setuju sebesar 3% atas memperhatikan penilaian risiko yang harus ditanggung.

Secara umum responden menganggap penilaian resiko yang harus ditanggung masih belum begitu penting dalam kegiatan usaha. Hal tersebut dikarenakan para pelaku usaha belum secara utuh bisa mendeteksi secara dini kemungkinan kendala dan kegagalan usaha. Usaha yang dilakukan selama ini masih tahap bertahan dan belum menciptakan peluang.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Kebutuhan akan aktifitas pengendalian dalam suatu organisasi bisnis menunjukkan sejumlah 17,0 % responden sangat setuju atas Kebutuhan akan aktifitas pengendalian dalam suatu organisasi bisnis 28.0% responden setuju atas Kebutuhan akan aktifitas pengendalian dalam suatu organisasi bisnis yang menyatakan netral sebesar 56.0 % atas Kebutuhan akan aktifitas pengendalian dalam suatu organisasi bisnis.

Secara umum responden menganggap aktivitas pengendalian masih dianggap belum begitu penting dalam kegiatan usaha. Hal ini menunjukkan belum adanya otorisasi dan persetujuan, verifikasi, rekonsiliasi dan penilaian kinerja yang memadai. Dalam aktivitas pengendalian masih jarang dilakukannya pemisahan tugas ataupun dilakukannya bentuk pengendalian yang lain.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Kebutuhan akan informasi dan komunikasi menunjukkan sejumlah 11,0% responden sangat setuju atas Kebutuhan akan informasi dan komunikasi 83.0% responden setuju atas Kebutuhan akan informasi dan komunikasi yang menyatakan netral sebesar 6.0% atas Kebutuhan akan informasi dan komunikasi. Secara umum responden menganggap informasi dan komunikasi merupakan aktivitas yang penting dalam kegiatan usaha. Pelaku usaha sadar bahwa informasi dan komunikasi dari sumber internal dan eksternal akan meningkatkan efisiensi dan produktifitas usahanya.

5.2.4 Penilaian terhadap Aspek Perpajakan

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar menunjukkan sejumlah 47,0% responden sangat setuju atas Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar ,33.0% responden setuju atas Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang menyatakan netral sebesar 19.0 % atas Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Secara umum responden menganggap bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara. Kesadaran ini memicu para pelaku usaha untuk menerapkan aspek-aspek perpajakan dan berusaha taat pada aturan perpajakan.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Pajak menunjang pembangunan negara menunjukkan sejumlah 83,0 % responden sangat setuju atas Pajak menunjang pembangunan negara, 0% responden setuju atas Pajak menunjang pembangunan negara yang menyatakan netral sebesar 17.0 % atas Pajak menunjang pembangunan negara.

Secara umum responden menganggap bahwa pajak menunjang pembangunan negara. Kesadaran ini memicu para pelaku usaha untuk menerapkan menerapkan pemungutan pajak dari objek pajak dan menyetorkan pajak. Usaha ini dilakukan dengan harapan nantinya akan ada perbaikan infrastruktur dan fasilitas untuk kegiatan usahanya.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara menunjukkan sejumlah 28.0 % responden sangat setuju atas Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara, 56.0% responden setuju atas Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negarayang menyatakan netral sebesar 17.0% atas Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara

Secara umum responden menganggap penundaan pembayaran dapat merugikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha telah melakukan pembayaran pajak sesuai aturan. Kesadaran ini memicu para pelaku usaha untuk melakukan manajemen perpajakan. Sehingga tidak ada masalah terkait pelaporan dan pembayaran pajak.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara menunjukkan sejumlah 42.0% responden sangat setuju atas Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara, 58.0% responden setuju atas Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.

Secara umum responden menganggap bahwa membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaku usaha telah melakukan perhitungan dan pemotongan pajak sesuai aturan. Kesadaran

ini memicu para pelaku usaha untuk paham dan jeli pada subjek pajak dan objek pajak serta tarif perpajakan yang terjadi pada usahanya.

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Anda mengalokasikan dana untuk membayar pajak menunjukkan sejumlah 83.0% responden sangat setuju atas dana yang dialokasikan untuk membayar pajak, 17.0% responden setuju atas dana yang dialokasikan untuk membayar pajak. Secara umum responden menunjukkan bahwa telah mengalokasikan dana untuk membayar pajak. Usaha ini merupakan bukti bahwa secara umum pelaku usaha telah membayar pajak

Hasil yang diperoleh dari tanggapan responden penelitian terkait Jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka akan dikenakan sanksi pajak menunjukkan sejumlah 25.0 % responden sangat setuju atas tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi pajak, 28.0 % responden setuju atas tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi pajak yang menyatakan netral sebesar 47.0 % atas tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi pajak. Secara umum responden paham bahwa jika tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi. Namun juga cukup banyak pelaku usaha yang tidak menganggap penting atas sanksi perpajakan.

V. SIMPULAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa langkah langkah yang harus dilakukan IKM dan UKM dalam menghadapi persaingan harus melihat beberapa aspek berikut:

1. Aspek Akuntansi Manajemen

Dalam aspek Akuntansi Manajemen, IKM dan UKM harus memperhatikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan usahanya, baik itu informasi internal untuk perbaikan maupun aspek eksternal perusahaan terkait dengan peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi kemampuan bersaing kegiatan usaha.

2. Aspek Akuntansi Keuangan

Meskipun bukan menjadi prioritas utama dalam mengembangkan usaha, akan tetapi aspek akuntansi dan keuangan menjadi penting saat usaha IKM dan UKM menjadi semakin besar dan berkembang, sehingga harus dipersiapkan dengan baik terkait aspek ini.

3. Aspek Pengendalian

Aspek pengendalian menjadi aspek yang kurang diperhatikan dalam meningkatkan kegiatan usaha untuk dapat bersaing, karena tingkat kompleksitas masalah dalam IKM

dan UKM masih rendah, sehingga masalah-masalah yang muncul masih dapat ditangani secara langsung.

4. Aspek Perpajakan

Aspek penting lainnya yang harus diperhatikan IKM dan UKM adalah aspek perpajakan. Hal ini dikarenakan pentingnya aspek ini, karena aspek perpajakan sangat bermanfaat untuk pembangunan bangsa. IKM dan UKM sudah mematuhi semua aspek perpajakan dan aturan-aturannya.

REFERENSI

- Aulia, D. 2014. Apa itu Masyarakat ASEAN. <https://daninformen.wordpress.com/2014/09/13/apa-itu-masyarakat-ekonomi-asean/>
- Inay.2015. Kesiapan Mahasiswa Jadikan MEA sebagai Pencerahan.[*Universal Post Manager*] plugin from www.ProfProjects.com
- Koran Sindo.Mei, 2014.*Bagaimana Kesiapan SDM Indonesia Menghadapi MEA.*
- Prasetyo, B. 2014.Menilik Kesiapan Dunia Ketenagakerjaan Indonesia Menghadapi MEA.*Jurnal Rechts Vinding.*
- Rangkuti, F (2008). *Strategi Promosi yang Kreatif.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiana, Gima, A. 2008. *Metode Rise Bisnis dan Manajemen.* Bandung: Gunadarma Intimarta.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis.* Cetakan Kesepuluh. Bandung: Alfabeta.
- Yushita, A. N. Kesadaran Kewajiban Perpajakan pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah. *Working paper.* UNY.
<http://bisnisukm.com/pentingnya-strategi-pemasaran-untuk-ukm.html>